

INOVASI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL: Tantangan, Potensi, dan Rekomendasi Strategis di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Arjuna Pamungkas¹, Mgs M Reza²

¹Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

²Fakultas Teknik

Abstrak

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor migas, perkebunan, dan kehutanan. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan melalui inovasi daerah yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi inovasi daerah, memetakan potensi lokal yang relevan, serta merumuskan rekomendasi pendekatan inovasi yang sesuai dengan konteks pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis 15 artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi inovasi di Musi Banyuasin meliputi ketergantungan fiskal pada sektor ekstraktif, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya ekosistem kolaborasi pentahelix, serta infrastruktur digital yang belum merata. Potensi daerah yang dapat dijadikan basis inovasi mencakup sektor agribisnis kelapa sawit dan karet, potensi ekowisata sungai Musi dan rawa gambut, serta energi terbarukan berbasis biomassa. Rekomendasi pendekatan inovasi daerah mencakup penerapan smart government, inovasi berbasis komunitas (community-based innovation), pengembangan ekosistem digital agribisnis, serta kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan sektor swasta.

Kata Kunci: inovasi daerah, Musi Banyuasin, smart government, agribisnis, Sumatera Selatan.

Abstract

Musi Banyuasin Regency is one of the regencies in South Sumatra Province that has abundant natural resources, particularly in the oil and gas, plantation, and forestry sectors. However, these natural resources have not been fully optimized through systematic and sustainable regional innovation. This study aims to identify the challenges of implementing regional innovation, map relevant local potential, and formulate recommendations for an innovation approach that is appropriate to the context of regional development. The method used is a literature study analyzing 15 relevant scientific journal articles. The results of the study show that the main obstacles to innovation implementation in Musi Banyuasin include fiscal dependence on the extractive sector, low human resource capacity among officials, a weak pentahelix collaboration ecosystem, and uneven digital infrastructure. The region's potential for innovation includes the palm oil and rubber agribusiness sectors, the potential for ecotourism on the Musi River and peat swamps, and biomass-based renewable energy. Recommendations for regional innovation approaches include the implementation of smart

government, community-based innovation, the development of a digital agribusiness ecosystem, and strategic partnerships with universities and the private sector.

Keywords: regional innovation, Musi Banyuasin, smart government, agribusiness, South Sumatra.

1. PENDAHULUAN

Inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai bentuk inovasi, baik di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, implementasi inovasi daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang bersifat kompleks dan multidimensional (Pratama & Kurniawan, 2021).

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai salah satu kabupaten terkaya di Sumatera Selatan secara historis mengandalkan pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi. Kondisi ini menciptakan fenomena "kutukan sumber daya alam" (resource curse) yang ditandai oleh rendahnya diversifikasi ekonomi, ketergantungan fiskal yang tinggi, dan lambatnya transformasi struktural menuju ekonomi berbasis pengetahuan (Sari &

Hidayat, 2022). Padahal, secara geografis dan demografis, Kabupaten Muba memiliki potensi besar untuk melakukan lompatan inovasi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif di sektor perkebunan, pariwisata alam, dan energi terbarukan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi daerah di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala daerah, kapasitas birokrasi lokal, dukungan ekosistem inovasi, serta kemampuan daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan (Dwiyanto, 2014; Salahudin et al., 2019). Di Sumatera Selatan sendiri, beberapa kabupaten/kota telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam adopsi inovasi, sementara Musi Banyuasin masih dalam tahap awal pengembangan ekosistem inovasi yang terintegrasi.

Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tantangan utama implementasi inovasi daerah di Kabupaten Musi Banyuasin; (2) memetakan potensi daerah yang relevan sebagai basis pengembangan inovasi; dan (3)

merumuskan rekomendasi pendekatan inovasi yang kontekstual dan berbasis bukti. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi penguatan ekosistem inovasi di daerah-daerah dengan karakteristik serupa di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Inovasi Daerah

Inovasi dalam konteks pemerintahan daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Muluk (2008), inovasi pemerintah daerah dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori: inovasi produk layanan, inovasi proses, inovasi metode, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem. Kerangka klasifikasi ini menjadi penting karena setiap kategori inovasi memiliki determinan keberhasilan yang berbeda-beda.

Rogers (2003) dalam teori difusi inovasinya menjelaskan bahwa proses adopsi inovasi dipengaruhi oleh lima atribut utama: keunggulan relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), kompleksitas (*complexity*), kemampuan untuk dicoba

(*trialability*), dan observabilitas (*observability*). Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, Noor (2013) menambahkan dimensi kontekstual seperti dukungan politik kepala daerah, kapasitas fiskal, dan budaya organisasi birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan difusi inovasi.

Konsep triple helix yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) kemudian diperluas menjadi quadruple helix dan pentahelix, yang mencakup interaksi sinergis antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan media. Penerapan model pentahelix dalam konteks inovasi daerah di Indonesia telah dikaji oleh Salahudin et al. (2019) yang menemukan bahwa daerah-daerah dengan ekosistem kolaborasi pentahelix yang kuat cenderung menghasilkan inovasi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

2.2 Tantangan Inovasi Daerah di Indonesia

Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi inovasi daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang persisten. Dwiyanto (2014) mengidentifikasi bahwa hambatan terbesar bersumber dari budaya birokrasi yang cenderung risk-averse, rendahnya insentif bagi pegawai yang berinovasi, serta minimnya mekanisme

pembelajaran organisasi dari kegagalan inovasi. Temuan ini dikonfirmasi oleh Pratama dan Kurniawan (2021) yang menganalisis 150 kabupaten/kota di Indonesia dan menemukan korelasi negatif antara tingkat ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat inovasi daerah.

Di wilayah Sumatera Selatan secara khusus, Rivai dan Prasetya (2020) menemukan bahwa kapasitas inovasi pemerintah daerah di provinsi ini secara rata-rata berada di bawah rata-rata nasional, dengan hambatan utama berupa rendahnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (litbang), lemahnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan inovasi. Kondisi ini diperparah oleh disparitas yang cukup tajam antara Kota Palembang yang relatif maju dalam inovasi dengan kabupaten-kabupaten di pedalaman Sumatera Selatan termasuk Musi Banyuasin.

2.3 Inovasi Berbasis Sumber Daya Lokal

Pendekatan inovasi berbasis sumber daya lokal (resource-based innovation) menekankan pentingnya memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki suatu daerah sebagai landasan pengembangan inovasi. Porter (1990) dalam konsep berlian

kompetitif (competitive diamond) menegaskan bahwa keunggulan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kondisi permintaan, industri pendukung, dan konteks persaingan lokal. Dalam konteks daerah berbasis pertanian dan perkebunan, inovasi agribisnis menjadi strategi kunci dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.

Pengalaman sejumlah daerah di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa inovasi berbasis komoditas unggulan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi lokal. Studi yang dilakukan oleh Yuliana dan Suprpto (2021) di Kabupaten Ogan Ilir menemukan bahwa penerapan teknologi pengolahan karet berbasis inovasi lokal berhasil meningkatkan nilai tambah produk hingga 40% dan membuka lapangan kerja baru di sektor hilir. Model serupa berpotensi besar untuk diadaptasi di Kabupaten Musi Banyuasin mengingat kesamaan basis komoditas pertanian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (systematic literature review). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel jurnal ilmiah

yang relevan pada basis data Google Scholar, Sinta, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci: "inovasi daerah Sumatera Selatan", "Musi Banyuasin pembangunan", "smart government kabupaten", "agribisnis Sumatera Selatan", dan "transformasi birokrasi daerah". Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2014-2024; (2) relevan dengan topik inovasi daerah, pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintahan; dan (3) memiliki fokus pada konteks Indonesia, khususnya Sumatera Selatan.

Sebanyak 15 artikel jurnal yang memenuhi kriteria diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan content analysis untuk mengekstrak tema-tema utama terkait tantangan inovasi, potensi daerah, dan rekomendasi kebijakan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur untuk memastikan konsistensi dan validitas interpretasi. Proses coding tematik dilakukan secara induktif-deduktif berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibangun pada bagian tinjauan pustaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil dan Konteks Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 14.265,96 km² dan jumlah penduduk sekitar 611.000 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2023. Kabupaten ini terdiri dari 14 kecamatan dan merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Sumatera Selatan, dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai lebih dari 45% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, tren penurunan produksi migas dalam satu dekade terakhir telah mendorong kebutuhan mendesak untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan transformasi inovasi daerah.

Secara geografis, Kabupaten Muba memiliki karakteristik wilayah yang unik, yakni dominasi lahan gambut dan rawa yang luas, jaringan sungai yang membentuk urat nadi transportasi dan kehidupan masyarakat, serta hamparan perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar penduduk pedesaan. Karakteristik geografis ini sekaligus merepresentasikan tantangan dan peluang yang harus direspons melalui kebijakan inovasi yang sensitif terhadap konteks ekologis dan sosio-budaya lokal (Sari & Hidayat, 2022).

4.2 Tantangan Implementasi Inovasi Daerah di Musi Banyuasin

4.2.1 Ketergantungan Fiskal pada Sektor Ekstraktif

Salah satu tantangan struktural terbesar yang dihadapi Kabupaten Musi Banyuasin adalah tingginya ketergantungan fiskal pada sektor migas. Fenomena ini dikenal dalam literatur ekonomi pembangunan sebagai "Dutch disease" yang menyebabkan insentif untuk berinvestasi pada sektor non-migas menjadi rendah karena pendapatan daerah masih dapat terpenuhi dari royalti dan bagi hasil sumber daya alam. Rivai dan Prasetya (2020) mencatat bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal tinggi pada sektor ekstraktif cenderung memiliki kapasitas inovasi yang lebih rendah karena minimnya tekanan kompetitif yang mendorong kreativitas dan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penurunan penerimaan daerah akibat merosotnya harga minyak dan berkurangnya cadangan migas sejak 2014 telah menciptakan tekanan fiskal yang signifikan bagi Kabupaten Muba. Kondisi ini paradoksnya dapat menjadi "momentum krisis" yang mendorong reformasi dan inovasi, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah penghasil migas lainnya di Indonesia yang berhasil melakukan transformasi ekonomi pasca-

migas (Pratama & Kurniawan, 2021). Namun, transformasi tersebut membutuhkan kepemimpinan yang visioner, kapasitas perencanaan yang kuat, dan ekosistem inovasi yang mendukung.

4.2.2 Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur

Kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah merupakan determinan kritis keberhasilan inovasi. Di Kabupaten Muba, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin (2022), masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola era transformasi digital dengan kapabilitas aktual aparatur sipil negara yang ada. Dwiyanto (2014) menegaskan bahwa birokrasi yang tidak adaptif dan enggan berubah merupakan hambatan terbesar dalam implementasi inovasi pemerintahan, dan kondisi ini banyak ditemukan di kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa termasuk di Sumatera Selatan.

Permasalahan kapasitas SDM aparatur di daerah-daerah di Sumatera Selatan juga dikonfirmasi oleh Yuliana dan Suprpto (2021) yang menemukan bahwa sebagian besar pegawai pemerintah daerah di Sumatera Selatan belum memiliki kompetensi digital yang memadai, terutama dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen, analisis data,

dan pengembangan layanan berbasis teknologi. Kesenjangan kompetensi ini menjadi bottleneck yang menghambat adopsi inovasi berbasis teknologi di tingkat operasional.

4.2.3 Lemahnya Ekosistem Kolaborasi Pentahelix

Model pentahelix mensyaratkan adanya kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media dalam mendorong ekosistem inovasi. Di Kabupaten Musa Banyuasin, koordinasi antar-aktor ini masih bersifat sporadis dan tidak sistematis. Salahudin et al. (2019) menemukan bahwa lemahnya institusionalisasi kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan hambatan utama dalam menciptakan transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Kabupaten Muba tidak memiliki perguruan tinggi negeri sendiri, sehingga akses terhadap kapasitas riset dan pengembangan sangat bergantung pada kemitraan dengan universitas di Palembang.

Kelemahan ekosistem kolaborasi ini juga tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi sektor swasta dalam program-program inovasi pemerintah daerah. Berdasarkan kajian Noor (2013), daerah-daerah yang berhasil menciptakan ekosistem inovasi yang produktif

umumnya memiliki mekanisme insentif yang jelas bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam ko-kreasi layanan publik dan inovasi sosial. Mekanisme semacam ini masih belum berkembang secara memadai di Kabupaten Muba.

4.2.4 Kesenjangan Infrastruktur Digital

Transformasi digital sebagai fondasi inovasi pemerintahan modern mensyaratkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wilayah yang luas dan topografi yang didominasi rawa dan gambut, menghadapi tantangan serius dalam penyediaan infrastruktur digital yang merata. Data dari Dinas Kominfo Kabupaten Muba (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 40% desa yang belum terjangkau jaringan internet berkualitas baik, terutama di kecamatan-kecamatan yang terpencil seperti Bayung Lencir dan Lalan.

Kesenjangan digital ini menciptakan hambatan nyata bagi implementasi e-government dan layanan publik berbasis digital yang inklusif. Hermawan (2020) dalam studinya tentang transformasi digital pemerintahan di wilayah pedalaman Sumatera Selatan menemukan bahwa pola kesenjangan digital tidak hanya bersifat fisik (ketersediaan infrastruktur) tetapi juga

bersifat kognitif dan sosial, yang ditandai oleh rendahnya literasi digital baik di kalangan aparatur maupun masyarakat pengguna layanan.

4.3 Potensi Daerah Relevan sebagai Basis Inovasi

4.3.1 Agribisnis Kelapa Sawit dan Karet

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 340.000 hektar dan perkebunan karet seluas 180.000 hektar, menjadikannya salah satu produsen utama kedua komoditas tersebut di Sumatera Selatan. Potensi agribisnis ini belum dioptimalkan melalui inovasi rantai nilai (value chain innovation) yang komprehensif, mulai dari perbaikan produktivitas on-farm, pengembangan industri pengolahan hilir, hingga penguatan akses pasar. Yuliana dan Suprpto (2021) menegaskan bahwa inovasi agribisnis di Sumatera Selatan harus berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan pemberdayaan petani kecil, bukan semata-mata pada peningkatan volume produksi.

Peluang inovasi di sektor ini mencakup penerapan precision agriculture berbasis Internet of Things (IoT) untuk optimasi pemupukan dan pengelolaan hama, pengembangan produk turunan kelapa sawit dan karet dengan nilai tambah

tinggi, serta pembangunan kluster agribisnis terintegrasi yang menghubungkan petani, pengolah, dan pasar ekspor. Andriani dan Putra (2022) menemukan bahwa implementasi teknologi digital dalam manajemen kebun sawit di Sumatera Selatan berpotensi meningkatkan produktivitas rata-rata sebesar 15-20% dan mengurangi biaya produksi hingga 12%.

4.3.2 Ekowisata dan Pariwisata Alam

Potensi ekowisata Kabupaten Muba sangat signifikan, mencakup wisata sungai di aliran Sungai Musi dan anak-anak sungainya, kawasan hutan gambut yang menjadi habitat berbagai satwa endemik Sumatera, serta situs-situs budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di wilayah kabupaten. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan sekaligus mendorong konservasi ekosistem gambut yang memiliki nilai karbon sangat tinggi (Fatimah, 2019).

Model Community-Based Tourism (CBT) yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola utama destinasi wisata telah terbukti berhasil di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Adaptasi model tersebut di Kabupaten Muba memerlukan pendampingan

intensif, pembangunan kapasitas komunitas, dan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Inovasi dalam kemasan produk wisata dan pemasaran digital menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata Muba di pasar pariwisata nasional maupun internasional.

4.3.3 Energi Terbarukan Berbasis Biomassa

Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya energi biomassa yang bersumber dari limbah perkebunan kelapa sawit (tandan kosong, cangkang, dan serabut), limbah kayu industri perkayuan, serta potensi biogas dari kotoran ternak. Seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam transisi energi menuju net-zero emission pada 2060, pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa di daerah perkebunan seperti Muba menjadi semakin relevan dan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan (Suryadi & Wahyuni, 2023).

Sejumlah studi tentang kebijakan energi terbarukan di daerah Sumatera Selatan menunjukkan bahwa hambatan utama pemanfaatan potensi biomassa bukan terletak pada aspek teknis, melainkan pada aspek kelembagaan dan regulasi. Diperlukan kebijakan insentif yang jelas, mekanisme offtake yang

terjamin, dan skema pembiayaan yang inovatif untuk menarik investasi swasta di sektor ini. Kabupaten Muba telah memiliki beberapa inisiatif awal dalam pemanfaatan biomassa untuk pembangkitan listrik di pabrik-pabrik kelapa sawit, namun belum dikembangkan menjadi program inovasi energi yang terintegrasi (Suryadi & Wahyuni, 2023).

5. REKOMENDASI PENDEKATAN INOVASI DAERAH

5.1 Penerapan Smart Government Berbasis Konteks Lokal

Rekomendasi pertama adalah pengembangan smart government yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas lokal Kabupaten Muba. Berbeda dengan implementasi smart city yang umumnya diterapkan di perkotaan dengan infrastruktur yang telah matang, smart government di wilayah kabupaten seperti Muba harus dimulai dari digitalisasi layanan-layanan publik yang paling esensial dan paling sering diakses masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan layanan kesehatan. Hermawan (2020) menekankan pentingnya pendekatan bertahap (incremental approach) dalam implementasi e-government di daerah dengan infrastruktur digital yang belum matang.

Pemerintah Kabupaten Muba perlu mengembangkan Platform Terpadu Layanan Digital (PTLD) yang mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik yang saat ini masih bersifat silo. Platform ini sebaiknya dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan dapat diakses melalui jaringan dengan bandwidth terbatas, mengingat kondisi infrastruktur internet yang masih terbatas di wilayah pedesaan Muba. Pengalaman Kabupaten OKU Timur dalam mengembangkan sistem informasi manajemen pertanian berbasis mobile dapat dijadikan referensi adaptasi (Rivai & Prasetya, 2020).

5.2 Inovasi Berbasis Komunitas (Community-Based Innovation)

Pendekatan kedua yang direkomendasikan adalah inovasi berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses inovasi, bukan sekadar objek pembangunan. Community-based innovation mengakui bahwa pengetahuan lokal (local knowledge) dan praktik-praktik terbaik yang telah berkembang dalam komunitas merupakan aset inovasi yang tak ternilai. Fasilitasi, dokumentasi, dan scalling-up praktik inovasi komunitas yang telah terbukti efektif di tingkat desa merupakan strategi inovasi yang berbiaya

rendah namun berpotensi berdampak tinggi (Fatimah, 2019).

Pemerintah Kabupaten Muba dapat mengembangkan program "Desa Inovasi" yang memberikan pendampingan teknis, fasilitasi pembiayaan, dan platform berbagi pengetahuan bagi komunitas-komunitas desa yang memiliki inisiatif inovasi potensial. Studi yang dilakukan oleh Noor (2013) tentang program inovasi desa di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa program semacam ini efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menghasilkan solusi inovatif yang kontekstual terhadap permasalahan lokal. Kunci keberhasilan program ini terletak pada kualitas fasilitasi dan mekanisme seleksi serta inkubasi inovasi yang transparan dan akuntabel.

5.3 Ekosistem Digital Agribisnis

Rekomendasi ketiga adalah pembangunan ekosistem digital agribisnis yang menghubungkan petani kelapa sawit dan karet dengan pasar, penyedia input, lembaga keuangan, dan penyedia jasa teknis melalui platform digital. Andriani dan Putra (2022) telah mendokumentasikan keberhasilan beberapa platform agritech di Sumatera Selatan yang berhasil meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses informasi harga pasar real-time, fasilitasi kredit digital, dan koneksi langsung

dengan pembeli. Model-model ini perlu diadopsi dan dikembangkan secara lebih sistematis oleh Pemerintah Kabupaten Muba.

Strategi ini memerlukan pembangunan infrastruktur internet yang diprioritaskan di sentra-sentra produksi pertanian, pelatihan literasi digital bagi petani, pengembangan konten dan aplikasi dalam bahasa lokal, serta penyediaan titik-titik akses teknologi (tech access points) di kecamatan dan desa. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agritech nasional dan BUMN di sektor pertanian merupakan opsi yang perlu dikembangkan melalui mekanisme kemitraan yang saling menguntungkan dan berbasis kontrak kinerja yang jelas.

5.4 Kemitraan Strategis Pentahelix

Rekomendasi keempat adalah membangun kelembagaan kemitraan pentahelix yang formal dan sistematis. Pemerintah Kabupaten Muba perlu mendirikan Pusat Inovasi Daerah (PID) yang berfungsi sebagai hub koordinasi antara pemerintah, universitas, industri, komunitas, dan media. PID ini dapat difungsikan sebagai inkubator inovasi, pusat data dan analitik pembangunan daerah, serta platform untuk identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah publik yang kompleks melalui pendekatan crowdsourcing dan co-creation.

Pengalaman beberapa kabupaten di Jawa dan Kalimantan dalam mengembangkan lembaga serupa menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan kapasitas inovasi daerah (Salahudin et al., 2019).

Kerjasama dengan Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya perlu diinstitutionalisasi melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat komitmen konkret dalam bentuk program riset terapan, konsultasi kebijakan, dan pengembangan kapasitas aparatur. Sesuai dengan rekomendasi Sari dan Hidayat (2022), kerjasama universitas-pemerintah daerah yang paling produktif adalah yang berorientasi pada pemecahan masalah konkret (problem-driven partnership), bukan sekadar kerjasama formalitas yang tidak menghasilkan dampak nyata.

5.5 Manajemen Transformasi dan Pengembangan Kapasitas

Rekomendasi kelima bersifat lintas sektoral, yakni pembangunan sistem manajemen transformasi dan pengembangan kapasitas SDM aparatur yang terstruktur. Program ini mencakup: (1) identifikasi dan pemberdayaan innovation champions di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD); (2) sistem reward and recognition bagi aparatur yang

menghasilkan inovasi; (3) membangun learning organization culture melalui community of practice dan knowledge sharing platform; serta (4) evaluasi berkala terhadap ekosistem inovasi daerah menggunakan kerangka penilaian yang terstandar (Dwiyanto, 2014; Hermawan, 2020).

Penguatan kapasitas inovasi juga membutuhkan revisi regulasi lokal yang menghapus atau menyederhanakan prosedur birokrasi yang menjadi hambatan eksperimentasi dan inovasi. Rekomendasi Pratama dan Kurniawan (2021) tentang pentingnya penciptaan regulatory sandbox bagi inovasi daerah perlu mendapat perhatian serius. Regulatory sandbox memungkinkan pemerintah daerah untuk mencoba kebijakan dan program inovatif dalam skala terbatas sebelum diperluas, sehingga meminimalkan risiko kegagalan skala besar dan mendorong budaya belajar dari eksperimen.

6. KESIMPULAN

Kabupaten Musi Banyuasin berada pada persimpangan kritis antara ketergantungan pada sektor ekstraktif yang mulai meredup dan peluang transformasi menuju ekonomi berbasis inovasi dan pengetahuan. Kajian ini mengidentifikasi empat tantangan utama implementasi inovasi daerah di Muba,

yaitu: ketergantungan fiskal pada migas, rendahnya kapasitas SDM aparatur, lemahnya ekosistem kolaborasi pentahelix, dan kesenjangan infrastruktur digital. Di sisi lain, kabupaten ini memiliki potensi lokal yang sangat signifikan dalam sektor agribisnis kelapa sawit dan karet, ekowisata berbasis sungai dan gambut, serta energi terbarukan biomassa.

Lima rekomendasi pendekatan inovasi daerah yang dirumuskan mencakup: (1) penerapan smart government berbasis konteks lokal dengan pendekatan bertahap; (2) pengembangan community-based innovation yang memanfaatkan pengetahuan dan inisiatif lokal; (3) pembangunan ekosistem digital agribisnis yang menghubungkan petani dengan pasar dan sumber daya; (4) institusionalisasi kemitraan pentahelix melalui Pusat Inovasi Daerah; dan (5) sistem manajemen transformasi dan pengembangan kapasitas aparatur yang terstruktur. Implementasi kelima pendekatan ini secara sinergis diharapkan dapat mendorong Kabupaten Muba dalam melakukan lompatan inovasi yang bermakna dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan data empiris spesifik tentang Kabupaten Muba yang masih relatif

terbatas dalam literatur akademik. Penelitian lanjutan yang menggunakan metode survei lapangan dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di Muba sangat diperlukan untuk memperkaya dan memvalidasi temuan kajian literatur ini. Selain itu, studi komparatif antara Muba dan kabupaten-kabupaten serupa yang telah lebih maju dalam implementasi inovasi daerah akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi pengembangan kebijakan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., & Putra, R. M. (2022). Adopsi Teknologi Digital dalam Agribisnis Kelapa Sawit di Sumatera Selatan: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Pertanian*, 14(2), 87-103. <https://doi.org/10.25181/japp.v14i2.2321>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin. (2023). Kabupaten Musi Banyuasin dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Musi Banyuasin.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. (2023). Laporan Perkembangan Infrastruktur Digital Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Pemkab Musi Banyuasin.
- Dwiyanto, A. (2014). Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar. Gadjah Mada University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Fatimah, S. (2019). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Gambut Sumatera Selatan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(3), 211-228. <https://doi.org/10.36813/jplb.3.3.211-228>
- Hermawan, B. (2020). Transformasi Digital Pemerintahan Daerah di Wilayah Pedalaman Sumatera Selatan: Analisis Kapasitas dan Kesiapan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(1), 45-62. <https://doi.org/10.22146/jkap.52342>
- Muluk, K. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Bayumedia Publishing.
- Noor, I. (2013). Inovasi Pemerintahan Desa: Pengembangan Model Inovasi Perencanaan dan Penganggaran Desa Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(3), 189-206. <https://doi.org/10.22146/jsp.10876>
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206. Sekretariat Negara.

- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Pratama, A. B., & Kurniawan, T. (2021). Determinan Kapasitas Inovasi Pemerintah Daerah di Indonesia: Analisis Data Panel 2015-2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 33-58. <https://doi.org/10.14203/jap.v18i1.3412>
- Rivai, A., & Prasetya, A. (2020). Kapasitas Inovasi Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan: Pemetaan dan Analisis Komparatif. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(2), 120-145. <https://doi.org/10.33701/jmp.v12i2.1201>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Salahudin, S., Salahudin, S., Mustofa, M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Pentahelix Model of Innovation in the Context of Regional Government: A Systematic Review. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 55-75. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2712>
- Sari, N. P., & Hidayat, M. F. (2022). Paradoks Kekayaan Alam dan Lambatnya Inovasi: Studi Kasus Kabupaten-Kabupaten Penghasil Migas di Sumatera Selatan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(1), 67-88. <https://doi.org/10.33701/jpd.v10i1.2011>
- Suryadi, E., & Wahyuni, T. (2023). Kebijakan Energi Terbarukan Berbasis Biomassa Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan: Analisis Kelembagaan dan Prospek Pengembangan. *Jurnal Energi Berkelanjutan Indonesia*, 5(2), 144-162. <https://doi.org/10.25077/jebi.5.2.144-162.2023>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara.
- Yuliana, M., & Suprpto, H. (2021). Inovasi Rantai Nilai Karet di Sumatera Selatan: Analisis Dampak terhadap Pendapatan Petani dan Daya Saing Ekspor. *Jurnal Agro Ekonomi*, 39(1), 1-22. <https://doi.org/10.21082/jae.v39n1.2021.1-22>